

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Makro

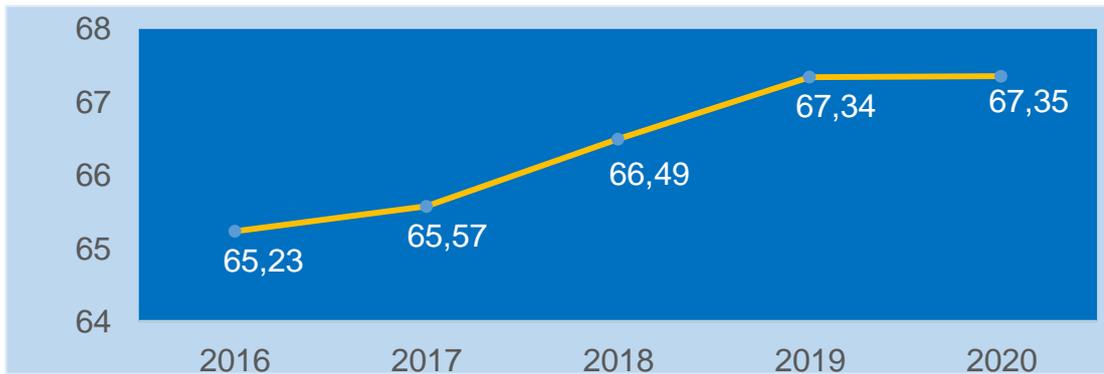
Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 67,34 dan IPM tahun 2010 sebesar 67,35 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Garfik 1.1
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020

| Kemiskinan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 27.120 | 27.020 | 26.020 | 25.990 | 24.690 |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 6,61 | 6,55 | 6,28 | 6,25 | 5,91 |

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2019

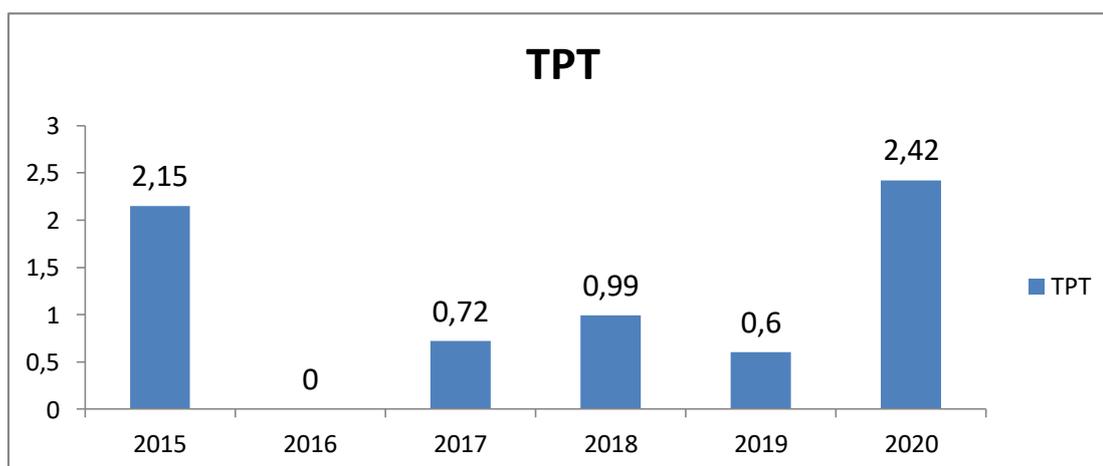
Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 27.120 jiwa (6,61%) turun menjadi 24.690 jiwa (5,91%) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena beberapa program dan kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3) Angka Pengangguran

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Terendah di Bali. Terhadap hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar sudah terserap di sektor formal maupun non formal, tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, seperti dalam Tabel Berikut :

Grafik 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2019 mencapai 11,13 triliun. Angka tersebut naik 10,55 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,48 persen.

Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi pendorong lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup tinggi ditengah

melambatnya sebagian besar lapangan usaha di Kabupaten Karangasem lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,85 persen tahun 2019.

Tumbuhnya ekonomi Kabupaten Karangasem banyak dipengaruhi oleh tumbuhnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa pendidikan penyediaan akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem.

Pada kurun waktu 2015 – 2019 Lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,93 persen, kemudian lapangan usaha jelas pendidikan dengan rata – rata pertumbuhan 8,75 persen, dan yang ketiga lapangan usaha jasa lainnya dengan rata-rata pertumbuhan 8,65 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem

| Laju Pertumbuhan Ekonomi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Kabupaten Karangasem | 6,00 | 5,95 | 5,06 | 5,48 | 5,50 |

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

5) Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita Karangasem tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30,10 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 30,10 juta selama tahun 2015, atau sekitar Rp 2,5 juta perbulannya. Besarnya PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 17,79 juta maka tahun 2015 sudah mencapai Rp 22 juta. Adapun PDRB perkapita pada tahun 2017 besarnya mencapai Rp 35,53 Juta atas dasar harga berlaku (ADHB), dan PDRB Kab Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tga tahun terakhir mengalami trend yang positif. PDRB Kab Karangasem pada tahun 2019 mencapai 41,06 ribu rupiah.

Tabel 1.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

| PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) | 29,93 | 32,65 | 35,36 | 38,27 | 41,06 |
| ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) | 22,00 | 23,18 | 24,24 | 25,44 | 26,73 |

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

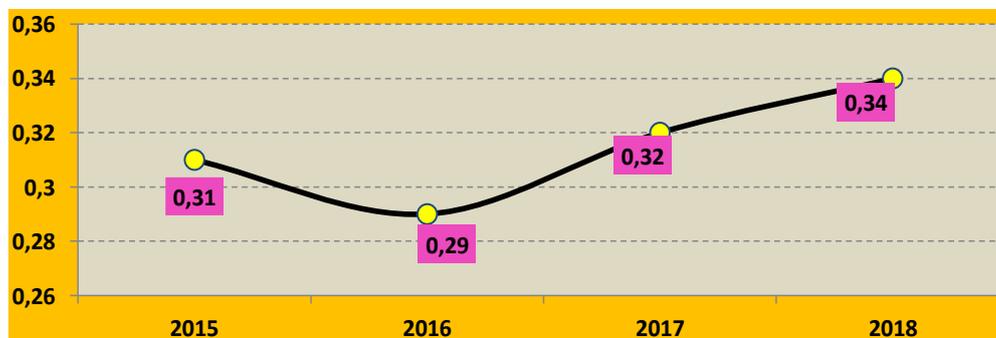
6) Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kab Karangasem tahun 2018 sebesar 0,34 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,32 namun hal ini masih dalam batas kewajaran dan masih dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi.

Grafik 1.3

Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2018



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

Tabel 1.4
Rekapan Capaian Kinerja Makro

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian Kinerja Tahun N-1 | Capaian Kinerja Tahun N | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | 67,34 | 67,35 | 0,01 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 25.990 | 24.690 | -5,27 |
| 3 | Angka Pengangguran | 0,6 | 2,42 | 75,21 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,48 | 5,50 | 0,36 |
| 5 | Pendapatan Per Kapita | 38,27 | 41,06 | 6,79 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,32 | 0,34 | 5,88 |

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

2.1 Ringkasan Capaian Kinerja Kunci Keluaran/Output

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|-----------------------|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) | 44 Satuan Pendidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 0 (Tidak ada data) | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 743 Peserta | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) | 460 Kebutuhan Minimal | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) | 376 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | 374 Pendidik | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|----------------------|-------------|------------|
| | | Jumlah kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah | 162 Kepala Sekolah | Disdikpora | |
| | | | | | |
| | | Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi | 402 SD dan SMP | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 11.220 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 3.088 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 44.477 Peserta Didik | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 20.935 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | 3.045 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | 1.439 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | 3.518 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | 1.125 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | 299 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | 312 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) | 333 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama tenaga kependidikan pada jenjang | 326 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|--------------------|-------------|------------|
| | | sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) | | | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 1.836 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 658 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 330 Kepala Sekolah | Disdikpora | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah | 47 Kepala Sekolah | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 0 (Tidak ada data) | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 2 Tenaga Penunjang | Disdikpora | |
| | | | | | |
| | | Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi | 396 SD dan SMP | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 11.131 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 2.978 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 44.477 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 20.935 Peserta Didik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar | 3.045 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 1.439 Kebutuhan | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | 3.496 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 1.097 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 299 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 312 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 333 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 326 Tenaga Kependidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 1.836 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 658 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon | 330 Kepala Sekolah | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | kepala sekolah | | | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 47 Kepala Sekolah | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 0 (Tidak ada data) | Disdikpora | |
| | | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 2 Tenaga Penunjang | Disdikpora | |
| | | | | | |
| | | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) | 10 Satuan Pendidikan | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 0 (Tidak ada data) | Disdikpora | |
| | | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 815 Peserta Didik | Disdikpora | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) | 58 Kebutuhan | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) | 239 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) | 195 Pendidik | Disdikpora | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 0 (Tidak ada data) | Disdikpora | |
| | | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 | 11 Kepala Sekolah | Disdikpora | |
| | | | | | |
| 2 | Kesehatan | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | 3 RS | Diskes | |
| | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya | 3 RS | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 807.218 logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal | 132 orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 30 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar | 149 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 12.914 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar | 205 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 6.847 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 139 Orang | Diskes | |
| | | | | | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 614 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | 262 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 2.500 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 36 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 35.845 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 70 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 2.500 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 36 Orang | Diskes | |
| | | | | | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 2.500 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 36 Orang | Diskes | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----------|-----------------------|--|------------------|-------------|------------|
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 2.448 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 36 Orang | Diskes | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 12.321 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 55 Orang | Diskes | |
| | | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia | 160.154 Logistik | Diskes | |
| | | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | 69 Orang | Diskes | |
| 3 | Pekerjaan Umum | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | 864 Ha | Dis PUPR | |
| | | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | 2.300 m | Dis PUPR | |
| | | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | 63,80 Ha | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|--|-------------|------------|
| | | Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | 1.140 m | Dis PUPR | |
| | | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020 | Dis PUPR | |
| | | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota | DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket | Dis PUPR | |
| | | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | 864 Ha | Dis PUPR | |
| | | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | 2.300 m | Dis PUPR | |
| | | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) | 63,80 Ha | Dis PUPR | |
| | | Panjang pantai di kawasan | 1.140 m | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m) | | | |
| | | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota | SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020 | Dis PUPR | |
| | | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket | Dis PUPR | |
| | | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota | Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 222.440,4 m ----- x 100% = 72,12% Panjang jaringan irigasi primer (m) 308.415 m | Dis PUPR | |
| | | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 12.594,7 m ----- x 100% = 66,94% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 18.814,7 m | Dis PUPR | |
| | | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% = 0% Panjang jaringan irigasi tersier (m) | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota | 1 Dokumen | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|--|--------------------|-------------------|
| | | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota | Pemuktakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Karangasem 2016-2019 | Dis PUPR | |
| | | Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain. | 2 Kerja Sama | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S | 123.861 Rumah (KK) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | 3.237 Rumah (KK) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | 127.098 Rumah (KK) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur | 145 Rumah | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|---|-------------|------------|
| | | tinja | | | |
| | | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | 146 Rumah | Dis PUPR | |
| | | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik | 127.098 Rumah (KK) | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | $\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | $\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{89 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,06\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | $\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} = \frac{3.237 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,29\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat | $\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | $\frac{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | $\frac{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{1,5 \text{ m}^3/\text{hari}}{30 \text{ m}^3/\text{hari}} \times 100\% = 5\%$ | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | $\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} = \frac{3.237 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,29\%$ | Dis PUPR | |
| | | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | $\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} = \frac{89 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,06\%$ | Dis PUPR | |
| | | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | $\frac{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\% = 0\%$ | Dis PUPR | |
| | | Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting | 99 IMB | Dis PUPR | |
| | | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung | 2 Dokumen | Dis PUPR | |
| | | Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan | 6 Buah Bangunan Gedung | Dis PUPR | |
| | | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota | 216 Buah | Dis PUPR | |
| | | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | 216 Buah | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota | 1.202,54 Km | Dis PUPR | |
| | | Panjang jalan yang dibangun | 2 KM | Dis PUPR | |
| | | Panjang jembatan yang dibangun | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | 2.920 Km | Dis PUPR | |
| | | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Panjang jembatan yang direhabilitasi | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Panjang jalan yang dipelihara | 8,98 Km | Dis PUPR | |
| | | Panjang jembatan yang dipelihara | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | | | | |
| | | Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi /analisis di wilayah Kabupaten/kota | 10 Orang | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah tenaga kerja operator/ teknisi / analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota | 10 Orang | Dis PUPR | |
| | | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota | 457 Orang | Dis PUPR | |
| | | Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir | Aplikasi SIPJAKI | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | Ada | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN | Ada | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya | Ada | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai | Ada | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|------------------|-------------|------------|
| | | kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | | | |
| | | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota | Ada | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis | 10 Sertifikat | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota | 457 Sertifikat | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|------------------|-------------|------------|
| | | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota | 41 Badan Usaha | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | Tersedia | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota | 104 Badan Usaha | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota | 72 Badan Usaha | Dis PUPR | |
| | | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota | 41 Badan Usaha | Dis PUPR | |
| | | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota | 41 Badan Usaha | Dis PUPR | |
| | | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui | 35 Badan Usaha | Dis PUPR | |
| | | Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |
| | | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | (Tidak Ada Data) | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|-------------------------|---|------------------|-------------|------------|
| | | | | | |
| 4 | Perumahan Rakyat | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah yang terkena bencana alam | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | | | | |
| | | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------|
| | | fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM | | | |
| | | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 8.121 ha | Dis Perkim | |
| | | Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | | | | |
| | | Jumlah luasan (Ha) kawasan | 12,41 Ha | Dis Perkim | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|---|-------------|------------|
| | | permukiman kumuh < 10 Ha | | | |
| | | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH | 4.277 Unit | Dis Perkim | |
| | | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh | 0,79.895 Ha | Dis Perkim | |
| | | | | | |
| | | Jumlah rumah di kab/kota | 253.171 Rumah | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH | 4.277 Unit | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah tidak layak huni | 8.121 Unit | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah yang tidak dihuni | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Rasio rumah dan KK | $\frac{\text{jumlah KK}}{\text{jumlah total unit rumah}} = \frac{253.171}{253.171}$ | Dis Perkim | |
| | | Jumlah rumah pembangunan baru | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | | | | |
| | | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----------|---|--|---|-------------|------------|
| | | Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah pengembang yang tersertifikasi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah pengembang yang teregistrasi | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | (Tidak Ada Data) | Dis Perkim | |
| | | | | | |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani | Jumlah pengaduan yang ditangani = 55 -----x 100% = 91,67% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 60 | SatPol PP | |
| | | Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | Satlinmas yang dikukuhkan = 2230 ----- x 100% = 80,27% Satlinmas yang terlatih = 2778 | SatPol PP | |
| | | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan = 11 -----x 100% = 100% Jumlah keseluruhan Perda / Perkada yang memuat Sanksi = 11 | SatPol PP | |
| | | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS | Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki kualitas PPNS = 1 -----x 100% = 1,06% Jumlah Polisi Pamong Praja = 94 | SatPol PP | |
| | | Tersedianya SOP dalam penegakan | Ada | SatPol PP | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|---|-------------|--|
| | | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | <i>jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i> = $\frac{519.998}{519.998} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> | BPBD | |
| | | Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | <i>jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i> = $\frac{519.998}{519.998} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> | BPBD | |
| | | | | | |
| | | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB | <i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i>x 100%= 0 <i>jumlah seluruh penetapan status KLB</i> | BPBD | |
| | | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | <i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i> = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i> | BPBD | SK Darurat Covid |
| | | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | <i>jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i> = $\frac{35}{84} \times 100\% = 41,66\%$ <i>jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i> | BPBD | SK Tim TRC, EWS, Pusdalops |
| | | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | <i>jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i> = $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$ <i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i> | BPBD | Data Rekap Korban Bencana (Meninggal, Luka Ringan, Luka Berat) |
| | | | | | |
| | | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh | <p style="text-align: center;">Jenis Layanan = 10 Layanan Jumlah Layanan = 71 Layanan</p> | Dis Damkar | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|--|-----------------------------|-------------|------------|
| | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota | | | |
| | | Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan | Ada | Dis Damkar | |
| | | Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan | Ada | Dis Damkar | |
| | | Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa | Ada | Dis Damkar | |
| | | Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi | Ada | Dis Damkar | |
| | | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran | Diklat pemadam I = 50 Orang | Dis Damkar | |
| | | Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran | 0 | Dis Damkar | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----------|---------------------|--|-----------------|-------------|------------|
| | | Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran | 0 | Dis Damkar | |
| | | | | | |
| 6 | Sosial | Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk | 55 Orang | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki | 5 Kendaraan | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 75 Orang | Dis Sosial | |
| | | Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima | 0 | Dis Sosial | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | paket sandang | | | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | 17 Orang | Dis Sosial | |
| | | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan | 56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan. | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | 20 Orang | Dis Sosial | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 384 Orang | Dis Sosial | |
| | | | | | |
| | | Jumlah korban bencana yang | 70 KK | Dis Sosial | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | mendapatkan makanan | | | |
| | | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang | 38 Paket | Dis Sosial | |
| | | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | 0 | Dis Sosial | |
| | | Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | 56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan. | Dis Sosial | |

2.2 Ringkasan Capaian Kinerja Kunci Hasil/Outcome

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD } 6.375}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 14.547} \times 100\% = 46,30\%$ | Disdikpora | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar } 40.920}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 41.158} \times 100\% = 99,42\%$ | Disdikpora | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | $\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama } 17.097}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 20.366} \times 100\% = 83,95\%$ | Disdikpora | |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar | $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan } 74.308}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan } 83.420} \times 100\% = 89,08\%$ | Disdikpora | |
| 2 | Kesehatan | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | $\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan } 355}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota } 519.998} \times 100\% = 0,068$ | Diskes | |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi | $\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi } 3}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota } 3} \times 100\% = 100\%$ | Diskes | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | <i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> 6.598 -----x100%= 95,43% <i>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota</i> 6.914 | Diskes | |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | <i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i> 6.920 -----x100%= 104,86% <i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i> 6.599 | Diskes | |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | <i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 6.671 -----x100%= 106,14% <i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i> 6.285 | Diskes | |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | <i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 23.007 -----x100%= 90,81% <i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i> 25.334 | Diskes | |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai | <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 28.719 -----x100%= 45,15% <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i> 63.602 | Diskes | |
| | | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <i>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 95.743 -----x100%= 37,80% <i>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota</i> 253.300 | Diskes | |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai | <i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 33.133 -----x100%= 52,82% <i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i> 62.732 | Diskes | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p><i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 44.379 -----x100%= 51,13%</p> <p><i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i> 86.791</p> | Diskes | |
| | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p><i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 3.815 -----x100%= 86,18%</p> <p><i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i> 4.427</p> | Diskes | |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | <p><i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 1.051 -----x100%= 83,75%</p> <p><i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i> 1.255</p> | Diskes | |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | <p><i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 924 -----x100%= 39,71%</p> <p><i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i> 2.327</p> | Diskes | |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | <p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> 5.535 -----x100%= 72,17%</p> <p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i> 7.669</p> | Diskes | |
| 3 | Pekerjaan Umum | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | <p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> 127.73 Ha -----x100%=14,78%</p> <p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir</i> 864 Ha</p> | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| | | | <i>di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> | | |
| | | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota | <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i> 11,63 -----x100%=18,23% <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i> 63,80 | Dis PUPR | |
| | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | <i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)</i> 280,17 Ha -----x100%= 5,92% <i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i> 4.727 Ha | Dis PUPR | |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | <i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i> 437.250 Jiwa -----x100%=92,67% <i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut</i> 471.820 Jiwa | Dis PUPR | |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | <i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i> 3.237 +123.861 -----x100%= 89,96% <i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota</i> 141.281 KK | Dis PUPR | |
| | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | <i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i> 99 -----x100%= 4,37% | Dis PUPR | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | Jumlah IMB yang berlaku 2.262 | | |
| | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap 852,27 Km -----x100%= 70,87% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1.202,54 Km | Dis PUPR | |
| | | Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis 9 -----x100%= 60% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota 15 | Dis PUPR | |
| | | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 0 -----x100%= 0% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 39 | Dis PUPR | |
| 4 | Perumahan Rakyat | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n -----x100%= 0 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n | Dis Perkim | |
| | | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni -----x100%= 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan | Dis Perkim | |
| | | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) 79,90 -----x100%= 643,84% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 12,41 | Dis Perkim | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---|---|--|-------------|------------|
| | | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | <i>Jumlah unit rumah tidak layak huni.</i> 8.121 -----x100%=5,30% <i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i> 153.125 | Dis Perkim | |
| | | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | <i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah unit rumah kab/kota</i> | Dis Perkim | |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | <i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i> 55 -----x100%= 91,67% <i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i> 60 | Satpol PP | |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | <i>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i> 11 -----x100%= 100% <i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i> 11 | Satpol PP | |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | <i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 519.998 Orang</i> | BPBD | |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | <i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 519.998 Orang</i> | BPBD | |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | <i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 18 Orang</i> | BPBD | |
| | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | <i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman</i> | Dis Damkar | |

| No | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | <p>di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: right;">20</p> <p>-----x100%=30,30%</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 66</p> | | |
| | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = $1.857/66 = 17,53$ menit | Dis Damkar | |
| 6 | Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p style="text-align: right;">496</p> <p>-----x100%= 7,45%</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</p> <p style="text-align: right;">6.662</p> | Disos | |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p style="text-align: right;">70</p> <p>-----x100%= 100%</p> <p>kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</p> <p style="text-align: right;">70</p> | Disos | |

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.

3.1 Hasil EPPD

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada tahun 2019, untuk Kabupaten Karangasem berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali. Skor yang diperoleh Kabupaten Karangasem sebesar **3.2456** dengan tingkat prestasi **tinggi**.

3.2 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 dari BPKP, Kabupaten Karangasem masih tetap meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI.

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

1) Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.455.141.988.165,53, Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

| No. | Jenis Pendapatan | Realisasi |
|-------------|---|---------------------------|
| I. | Pendapatan Asli Daerah | 216.682.876.355,05 |
| 1 | Hasil Pajak Daerah | 66.452.673.379,75 |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | 9.301.444.071,00 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.968.117.309,66 |
| 4 | Lain-Lain PAD Yang Sah | 128.960.641.594,64 |
| II. | Dana Perimbangan | 918.022.076.402,00 |
| 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 22.582.034.404,00 |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 713.291.169.000,00 |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 182.148.872.998,00 |
| III. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 320.437.035.408,48 |
| 1 | Pendapatan Hibah | 69.924.120.999,00 |
| 2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 5.911.697.367,89 |
| 3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 39.250.487.000,00 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 33.547.042.455,00 |
| 5 | Pendapatan Lainnya | 81.803.687.586,59 |
| | JUMLAH = | 1.455.141.988.165,53 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

2) Realisasi Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

| No. | Jenis Belanja | Realisasi |
|------------|--|-----------------------------|
| I. | Belanja Tidak Langsung | 941.915.043.047,48 |
| 1 | Belanja Pegawai | 667.752.396.767,97 |
| 2 | Belanja Bunga | 2.785.820,91 |
| 3 | Belanja Hibah | 65.381.481.651,72 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.042.261.000,00 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 11.558.024.859,79 |
| 6 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 176.547.740.848,00 |
| 7 | Belanja Tak Terduga | 19.630.352.099,09 |
| II. | Belanja Langsung | 490.119.080.585,11 |
| 1 | Belanja Pegawai | 64.949.430.400,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 352.725.567.410,55 |
| 3 | Belanja Modal | 72.444.082.774,56 |
| | JUMLAH = | 1.432.034.123.632,59 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

5. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.455.141.988.165,53 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.510.576.917.062,23 atau 96,33% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

| No. | Jenis Pendapatan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| I. | Pendapatan Asli Daerah | 207.905.009.114,20 | 216.682.876.355,05 | 104,22% |
| 1 | Hasil Pajak Daerah | 60.391.998.711,00 | 66.452.673.379,75 | 110,04% |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | 8.580.762.000,00 | 9.301.444.071,00 | 108,40% |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.968.117.309,66 | 11.968.117.309,66 | 100,00% |
| 4 | Lain-Lain PAD Yang Sah | 126.964.131.093,54 | 128.960.641.594,64 | 101,57% |
| II. | Dana Perimbangan | 946.516.771.974,00 | 918.022.076.402,00 | 96,99% |
| 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 27.597.564.974,00 | 22.582.034.404,00 | 81,83% |
| 2 | Dana Alokasi Umum | 716.253.373.000,00 | 713.291.169.000,00 | 99,59% |
| 3 | Dana Alokasi Khusus | 202.665.834.000,00 | 182.148.872.998,00 | 89,88% |
| III. | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 356.155.135.974,03 | 320.437.035.408,48 | 89,97% |
| 1 | Pendapatan Hibah | 68.365.798.978,65 | 69.924.120.999,00 | 102,28% |
| 2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 131.531.146.245,38 | 5.911.697.367,89 | 72,92% |
| 3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 39.250.487.000,00 | 39.250.487.000,00 | 100,00% |
| 4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 35.204.047.750,00 | 33.547.042.455,00 | 95,29% |
| 5 | Pendapatan Lainnya | 81.803.656.000,00 | 81.803.687.586,59 | 100,00% |
| | JUMLAH = | 1.510.576.917.062,23 | 1.455.141.988.165,53 | 96,33% |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.216.682.876.355,05 dari yang ditargetkan sebesar Rp.207.905.009.114,20 atau 104,22%. Sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

| No. | Jenis Belanja | Target | Realisasi | Tingkat Capaian |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| I. | Belanja Tidak Langsung | 1.030.322.509.335,80 | 941.915.043.047,48 | 91,42% |
| 1 | Belanja Pegawai | 706.131.471.727,80 | 667.752.396.767,97 | 94,56% |
| 2 | Belanja Bunga | 100.000.000,00 | 2.785.820,91 | 2,79% |
| 3 | Belanja Hibah | 65.853.888.978,65 | 65.381.481.651,72 | 99,28% |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 1.750.000.000,00 | 1.042.261.000,00 | 59,56% |
| 5 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 11.558.235.078,48 | 11.558.024.859,79 | 100% |
| 6 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 178.574.948.000,00 | 176.547.740.848,00 | 98,86% |
| 7 | Belanja Tak Terduga | 66.353.965.550,87 | 19.630.352.099,09 | 29,58% |
| II. | Belanja Langsung | 583.078.720.080,96 | 490.119.080.585,11 | 84,06% |
| 1 | Belanja Pegawai | 71.429.041.662,00 | 64.949.430.400,00 | 90,93% |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 415.825.587.461,73 | 352.725.567.410,55 | 84,83% |
| 3 | Belanja Modal | 95.824.090.957,23 | 72.444.082.774,56 | 75,60% |
| | JUMLAH = | 1.613.401.229.416,76 | 1.432.034.123.632,59 | 88,76% |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.613.401.229.416,76 terealisasi sebesar Rp.1.432.034.123.632,59 atau 88,76%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari jenis Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bunga terealisasi 59,56% dan Belanja Tak Terduga terealisasi 29,58%. Sedangkan pada jenis Belanja Langsung yang terealisasi sangat rendah adalah Belanja Modal terealisasi 75,60%.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.102.969.312.354,53 dan terealisasi sebesar Rp.102.972.554.540,53 atau 100,00% lebih, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.102.969.340.904,53 dan terdapat realisasi penerimaan pada pos Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.3.213.636,00.

Tabel 1.10
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

| No. | Jenis Pembiayaan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| I. | Penerimaan Pembiayaan | 102.969.312.354,53 | 102.972.554.540,53 | 100,00% |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 102.969.312.354,53 | 102.969.340.904,53 | 100,00% |
| 2 | Penerimaan Piutang Daerah | - | 3.213.636,00 | - |
| II. | Pengeluaran Pembiayaan | 145.000.000,00 | 65.436.458,22 | 45,13% |
| 1 | Pembayaran Pokok Utang | 145.000.000,00 | 65.436.458,22 | 45,13% |
| | Pembiayaan netto = | 102.824.312.354,53 | 102.907.118.082,31 | 100,08% |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan direncanakan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.145.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.436.458,22 atau 45,13%.

Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp.126.014.982.615,25.

Amlapura, 26 Maret 2021
Bupati Karangasem, 

I Cede Dana